SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1783

STRATEGI PERENCANAAN PROGRAM JEBOL PAWON REMBES DALAM MENGURANGI KERENTANAN SOSIAL KEPENDUDUKAN DI SURABAYA

Planing Strategy of the Jebol Pawon Rembes Program in Reducing Social Vulnerability in Surabaya

Bilqiis Abiyyah Az Zainiyah[1*], Melvin Aurelia Alina Putri[2], Revania Anindhita Putri[3], Aulya Amanda Putri[4], Meirinawati[5], Trenda Aktiva Oktariyanda[6]

*[1-6]Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Surabaya

*email:
25040674169@mhs.unesa.ac.id
25040674163@mhs.unesa.ac.id
25040674170@mhs.unesa.ac.id
25040674154@mhs.unesa.ac.id
meirinawati@unesa.ac.id
trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Lisensi:CC-BY

Kata Kunci:
Perencanaan, SMART, POAC, Administrasi Kependudukan, Kerentanan Sosial

Keywords:
Planning, SMART, POAC, Population Administrasi, Social Vulnerablity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Jebol Pawon Rembes dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan lansia, yang disebabkan oleh keterbatasan akses layanan, rendahnya literasi administrasi, serta hambatan mobilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan dianalisis menggunakan teori manajemen POAC *(Planning, Organizing, Actuating, Controlling)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perencanaan, program telah memiliki tujuan yang cukup spesifik melalui pendekatan SMART, namun masih lemah pada indikator terukur dan batas waktu. Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas dan kewenangan telah berjalan secara terstruktur. Pada aspek pelaksanaan, strategi jemput bola mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. Sementara itu, pada aspek pengawasan masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia sehingga jangkauan layanan belum merata. Kesimpulannya, Program Jebol Pawon Rembes telah berkontribusi dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan, tetapi pelaksanaannya belum optimal sehingga diperlukan penguatan pada aspek perencanaan dan sumber daya manusia agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Abstract

This study aims to analyze the Jebol Pawon Rembes Program in reducing social vulnerability related to population administration in Wonokusumo Village, Surabaya City. The main issue addressed in this study is the low ownership of population administration documents among vulnerable groups, such as low-income communities and the elderly, caused by limited access to services, low administrative literacy, and mobility barriers. This study employed a qualitative approach using a literature study method and was analyzed through the POAC management theory (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). The results indicate that, in the planning aspect, the program has established relatively specific objectives through the SMART approach, although measurable indicators and time limits remain weak. In the organizing aspect, the division of tasks and authority has been implemented systematically. In the actuating aspect, the outreach service strategy has increased community participation and facilitated access to population administration services. Meanwhile, in the controlling aspect, limitations in human resources have resulted in uneven service coverage. In conclusion, the Jebol Pawon Rembes Program has contributed to reducing social vulnerability in population administration, although its implementation has not been fully optimal. Therefore, strengthening planning and human resources is necessary to ensure more equitable public services.

Submit Tgl.: 04-Mei-2026	Diterima Tgl.: 09-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 12-Mei-2026

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan sosial kependudukan, seperti keterbatasan akses layanan administrasi, kemiskinan, serta kerentanan kelompok masyarakat tertentu seperti masyarakat berpenghasilan rendah, dan lansia. Telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat 3,56 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan program sosial berbasis kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mengurangi kerentanan sosial kependudukan. Kebijakan publik menjadi landasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan publik diwujudkan oleh pemerintah kemudian diorientasikan pada pengadaan keperluan masyarakat dengan mengedepankan keperluan masyarakat. Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan sebuah sistem agar suatu kebijakan mencapai tujuan.

Sistem administrasi kependudukan adalah sebuah komponen dari struktur administrasi negara yang memiliki kedudukan secara fundamental dalam pemerintahan untuk menangani catatan kependudukan masyarakat (Jelita and Prastyawan, 2025). Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan masyarakat yang mudah di akses (Jelita and Prastyawan, 2025). Seperti yang telah terjadi di lapangan, pelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, masih kurang baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan serangkaian pengelolaan dan penerbitan dokumen atau data kependudukan dengan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan peraturan Per Undang – Undangan menegaskan bahwa, negara bertanggung jawab atas hak dan kewajiban warga negara, kewenangan penyelenggaraan dan instansi pemerintah, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi kependudukan, sangsi dan hukuman yang terkait dengan administrasi kependudukan.

Pemerintah Kota Surabaya mendorong seluruh masyarakat, termasuk lansia, untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan, karena dapat memberikan keuntungan bagi penduduk golongan lansia dengan adanya bantuan dari pemerintah meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah menerapkan kebijakan mendukung setiap inovasi dari program Jebol Anduk yang dilakukan oleh Kelurahan di Kota Surabaya, seperti mengganti nama inovasi program. Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya menjalankan inovasi program Jebol Pawon Rembes (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonokusumo di Balai RW Membawa Solusi) dilakukan pada 11 Januari 2022 (Jelita and Prastyawan, 2025). Program Jebol Pawon Rembes ini terdiri dari tiga jenis layanan yaitu layanan administrasi kependudukan, layanan non administrasi kependudukan, dan layanan konsultasi. Program Jebol Pawon Rembes terdiri, pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, serta pelayanan E-KTP yang bertempat di seluruh Balai RW yang ada di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya.

Program Jebol Pawon Rembes membuat Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya antusias untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan di Balai RW terutama lansia. Program ini sangat membantu dan memudahkan mereka dalam mengelola dokumen kependudukan. Dalam menjalankan sebuah program tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat masalah dalam menjalankan inovasi program Jebol Pawon Rembes, kurangnya Sumber Daya Manusia atau keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia. Kelurahan Wonokusumo memiliki 16 Balai RW dan menyediakan inovasi Program Jebol Pawon Rembes. Namun, karena keterbatasan pegawai dan sarana pelayanan, Program Jebol Pawon Rembes saat ini baru dapat dilaksanakan di 2 RW dari total 16 RW yang ada di Kelurahan Wonokusumo. Warga bergiliran jika

mengurus layanan administrasi kependudukan agar tetap kondusif pegawai menjadwalkan dan mendata agar tidak terjadi tumpang tindih.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara lengkap dan secara mendalam tentang Program Jebol Pawon Rembes di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori manajemen POAC *(Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Dalam aspek perencanaan *(planning)* ini merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur demi mencapai tujuan organisasi atau pun untuk memecahkan masalah tertentu, serta sebagai upaya pemanfaatan dari sumber daya yang tersedia dengan tetap memperhatikan segala aspek dan keterbatasan. Analisis dilanjutkan pada tahap pengorganisasian (organizing) yang menelaah bagaimana Kelurahan Wonokusumo mengatur pembagian tugas personil di tengah keterbatasan jumlah pegawai, bagian ini sangat krusial untuk melihat bagaimana sumber daya yang ada dimanfaatkan agar pelayanan tetap optimal tanpa mengabaikan aspek keadilan distribusi layanan.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan *(actuating)* ini analisisnya difokuskan pada dinamika implementasi di lapangan, termasuk bagaimana komunikasi dan pendekatan petugas dalam memberikan solusi administratif yang inklusif pada warga. Terakhir, aspek pengawasan *(controlling)* digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk melihat sejauh mana program telah mencapai tujuannya, serta bagaimana umpan balik dari warga dijadikan dasar langkah korektif. Penelitian ini merujuk pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan di Kota Surabaya. Namun, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka sumber data penelitian difokuskan pada berbagai literatur dan dokumen terkait Program Jebol Pawon Rembes di Kelurahan Wonokusumo.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa laporan resmi dari instansi terkait. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder seperti profil kelurahan, laporan program, serta data statistik kependudukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajiannya data, dan penari kan kesimpulan. Lokasi penelitian difokuskan di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya, sebagai pelaksana Program Jebol Pawon Rembes. Adapun lama penelitian dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 1-2 bulan, yang mencakup tahap pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis dan penulisan laporan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data melalui konfirmasi dan tanggulangi sumber.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara lengkap dan secara mendalam tentang Program Jebol Pawon Rembes di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori manajemen POAC *(Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Dalam aspek perencanaan (*planning)* ini merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur demi mencapai tujuan organisasi atau pun untuk memecahkan masalah tertentu, serta sebagai upaya pemanfaatan dari sumber daya yang tersedia dengan tetap memperhatikan segala aspek dan keterbatasan. Analisis dilanjutkan pada tahap pengorganisasian (organizing) yang menelaah bagaimana Kelurahan Wonokusumo mengatur pembagian tugas personil di tengah keterbatasan jumlah pegawai, bagian ini sangat krusial untuk melihat bagaimana sumber daya yang ada dimanfaatkan agar pelayanan tetap optimal tanpa mengabaikan aspek keadilan distribusi layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jebol Pawon Rembes di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya, tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi sebagai strategi untuk menjawab permasalahan kerentanan sosial kependudukan. Permasalahan ini meliputi rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, yang disebabkan oleh berbagai hambatan seperti keterbatasan akses layanan, rendahnya literasi administrasi, kondisi ekonomi, serta keterbatasan mobilitas pada kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan sosial kependudukan di mana masyarakat yang tidak memiliki dokumen resmi berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses berbagai layanan publik, sehingga memperkuat posisi marginal dalam struktur sosial.

1. Perencanaan *(Planning)*

Dalam perspektif teori POAC merupakan proses awal penetapan tujuan, penentuan sasaran, serta penyusunan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Perencanaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound)* yang diperkenalkan oleh George T. Doran. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan program harus dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, dapat dicapai, serta memiliki batas waktu yang pasti agar memudahkan proses evaluasi.

a. *Spesific* (Spesifik)

Program Jebol Pawon Rembes bertujuan dengan fokus yang jelas, yaitu meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di kalangan masyarakat yang rentan. Masalah yang mendasari perencanaan bersifat jelas dan terdefinisi dengan baik, seperti rendahnya kepemilikan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran karena keterbatasan akses layanan, rendahnya literasi administrasi, serta hambatan ekonomi dan mobilitas. Program ini tidak hanya menetapkan tujuan umum, tetapi juga menjelaskan sasaran spesifik yang mencakup kelompok prioritas, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga di daerah dengan akses layanan terbatas. Oleh karena itu, elemen khusus dalam perencanaan program ini telah memperlihatkan kejelasan dalam tujuan, sasaran, serta jenis intervensi yang akan dilaksanakan

b. *Measurable* (Terukur)

Program Jebol Pawon Rembes memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur, seperti jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan (KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran), bertambahnya penduduk yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan, serta berkurangnya masyarakat yang tidak memiliki identitas resmi. Keberhasilan program juga dapat dilihat dari frekuensi layanan jemput bola, cakupan wilayah pelayanan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, target kuantitatif program belum dijelaskan secara rinci sehingga evaluasi keberhasilannya masih kurang objektif.

c. *Achievable* (Dapat dicapai)

Program ini secara umum realistis untuk dilaksanakan karena didukung oleh strategi jemput bola. Strategi ini diwujudkan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, baik secara *door-to-door* maupun melalui pelayanan keliling dengan melibatkan perangkat lokal seperti RT/RW dan kelurahan. Pendekatan ini menjadi strategi kunci dalam perencanaan program karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, strategi jemput bola tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga berperan signifikan dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan melalui perluasan akses layanan publik. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target, sehingga perlu adanya penyesuaian antara target program dengan kapasitas yang tersedia.

d. *Realistic* (Realistik)

Perencanaan program telah direncanakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kebutuhan nyata masyarakat. Program ini ditujukan pada kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, sehingga intervensi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Strategi jemput bola juga menunjukkan usaha penyesuaian terhadap situasi sosial masyarakat yang tidak selalu bisa datang langsung ke kantor pelayanan. Meski demikian, terbatasnya jangkauan wilayah menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan secara komprehensif. Ini menunjukkan bahwa meski pun program dirancang secara realistis, pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam hal distribusi layanan. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilakukan penguatan perencanaan yang mengutamakan skala prioritas daerah agar pelaksanaan program tetap realistis dan lebih efisien dalam menjangkau kelompok yang paling memerlukan.

e. *Time-bound* (Berbatas waktu)

Perencanaan Program Jebol Pawon Rembes masih belum optimal dalam menetapkan target dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Hal ini terlihat dari pelayanan yang dilakukan bergantian setiap dua pekan di 2 dari 16 Balai RW, sehingga jangkauan layanan masih terbatas. Selain itu, belum terdapat target waktu terkait cakupan pelayanan maupun jumlah layanan yang harus dicapai dalam periode tertentu, sehingga evaluasi program menjadi kurang terarah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan *timeline* yang lebih terstruktur agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan merata.

2. Pengorganisasian *(Organizing)*

Dalam pelaksanaan Program Jebol Pawon Rembes di Kota Surabaya, aspek pengorganisasian (organizing) menjadi elemen kunci yang menentukan efektivitas program dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, penetapan peran masing-masing pelaksana, serta pengaturan alur kerja yang terstruktur antar pihak yang terlibat.

Pertama, pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya berperan sebagai koordinator utama yang merancang mekanisme operasional program. Dalam hal ini, setiap aktivitas telah dipetakan secara sistematis, mulai dari pendataan warga rentan, verifikasi dokumen, hingga proses penerbitan administrasi kependudukan. Pembagian aktivitas ini memungkinkan setiap tahapan berjalan secara terarah dan mengurangi potensi tumpang tindih pekerjaan.

Kedua, pembagian tugas dilakukan secara spesifik dengan melibatkan berbagai aktor, seperti petugas Dispendukcapil, perangkat kelurahan, kader masyarakat, serta tim lapangan. Petugas Dispendukcapil bertanggung jawab pada aspek administratif dan teknis, seperti pengolahan data dan pencetakan dokumen. Sementara itu, perangkat kelurahan dan kader masyarakat berperan dalam mengidentifikasi serta menjangkau kelompok rentan, seperti lansia, warga berpenghasilan rendah, dan masyarakat dengan keterbatasan akses layanan. Pembagian kerja ini menunjukkan adanya spesialisasi tugas yang mempercepat proses pelayanan.

Ketiga, penentuan kewenangan dalam pelaksanaan program juga telah diatur dengan jelas. Setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya, kewenangan verifikasi data berada pada Dispendukcapil, sedangkan pengumpulan data awal dan fasilitasi komunikasi dengan masyarakat dilakukan oleh pihak kelurahan. Dengan adanya kejelasan otoritas ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi.

Hasil dari pengorganisasian yang baik ini terlihat pada meningkatnya jangkauan layanan administrasi kependudukan kepada kelompok rentan. Program ini mampu menembus hambatan akses yang sebelumnya dialami masyarakat, seperti keterbatasan mobilitas dan kurangnya pemahaman administratif. Selain itu, koordinasi yang efektif antar pelaksana juga berdampak pada efisiensi waktu pelayanan dan peningkatan akurasi data kependudukan.

Secara keseluruhan, fungsi organizing dalam Program Jebol Pawon Rembes telah berjalan cukup efektif dalam mendukung tujuan program. Pembagian kerja yang jelas, penetapan kewenangan yang tepat, serta koordinasi antar pihak yang terstruktur menjadi faktor utama keberhasilan program dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan di Kota Surabaya.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pada Program Jebol Pawon Rembes di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya dapat dilihat dari bagaimana pemerintah kelurahan menggerakkan sumber daya, pelaksanaan pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat agar tujuan program tercapai. Fungsi actuating dalam manajemen publik berfokus pada pelaksanaan kebijakan melalui pengarahan, koordinasi, motivasi, dan komunikasi kepada pelaksana maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Wonokusumo telah melakukan penggerakan program dengan cukup baik melalui pendekatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW. Strategi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya kelompok lansia dan masyarakat rentan yang mengalami kesulitan mengakses kantor pelayanan administrasi. Program ini juga mampu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian karena pelayanan dilakukan lebih mudah, cepat, dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga.

Selain itu, actuating terlihat dari adanya koordinasi antara pihak kelurahan dengan pengurus RW dalam penyediaan tempat pelayanan serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Kelurahan juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan agar masyarakat memahami manfaat administrasi kependudukan, termasuk untuk memperoleh bantuan sosial seperti BLT. Hal ini menunjukkan adanya fungsi pengarahan dan motivasi kepada masyarakat agar aktif mengikuti program.

Dengan demikian, analisis actuating Program Jebol Pawon Rembes menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berhasil menggerakkan pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama lansia. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui penambahan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi, serta pemerataan pelayanan agar seluruh RW dapat memperoleh manfaat program secara optimal.

4. Pengawasan *(Controlling)*

Tahap terakhir dalam perspektif POAC adalah pengawasan atau pengendalian. Dalam konteks Program Jebol Pawon Rembes, *controlling* bukan sekadar mekanisme administratif untuk memeriksa dokumen, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan di Kelurahan Wonokusumo. Fungsi pengawasan dalam program ini mencakup beberapa aspek krusial.

Pertama, Pemantauan Kesenjangan Layanan *(Gap Analysis)*. Melalui fungsi pengawasan, terdeteksi adanya ketimpangan antara perencanaan dan realitas di lapangan. Fakta bahwa program ini baru menjangkau 2 dari 16 RW menunjukkan bahwa fungsi *controlling* telah mengidentifikasi hambatan utama, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua, Mekanisme Umpan Balik yang Humanis. Salah satu kekuatan dari Program Jebol Pawon Rembes adalah adanya ruang interaksi langsung antara petugas dengan warga lansia maupun penyandang disabilitas. Pengawasan dilakukan secara organik melalui testimoni dan keluhan warga di Balai RW. Hal ini menciptakan efektivitas program tidak hanya dinilai dari angka statistik dokumen yang terbit, tetapi dari sejauh mana kesulitan mobilitas warga dapat teratasi.

Ketiga, Evaluasi Capaian Berbasis Kebutuhan. Berdasarkan hasil temuan, pengawasan terhadap program ini menekankan pada kualitas pelayanan. Pengendalian dilakukan dengan memastikan bahwa data kependudukan yang masuk segera diproses untuk memutus mata rantai kerentanan sosial.

Keempat, Tindakan Korektif dan Keberlanjutan. Hasil pengawasan menunjukkan perlunya langkah korektif berupa penjadwalan ulang yang lebih transparan dan efisien. Mengingat keterbatasan personel, fungsi controlling merekomendasikan kolaborasi yang lebih erat dengan kader masyarakat dan pengurus RW untuk membantu verifikasi data awal sebelum petugas kelurahan turun ke lapangan. Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi terhadap beban kerja petugas yang tinggi namun jangkauan wilayah yang masih terbatas.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa fungsi controlling pada Program Jebol Pawon Rembes menunjukkan bahwa inovasi ini memiliki mekanisme evaluasi yang jujur terhadap keterbatasan internalnya. Pengawasan tidak hanya berhenti pada laporan di atas kertas, tetapi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan strategi, terutama dalam hal redistribusi tenaga kerja dan penentuan prioritas wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial paling tinggi. Tanpa pengawasan yang ketat dan humanis, program jemput bola ini berisiko kehilangan momentumnya dalam memberikan keadilan akses bagi seluruh warga Kelurahan Wonokusumo.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia di tingkat lapangan dan ketergantungan pada inisiatif aktif dari perangkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk dengan baik, penguatan kapasitas pelaksana tetap diperlukan agar distribusi tugas dapat berjalan lebih optimal.

Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat program agar selaras dengan teori POAC. Pertama, perlu dilakukan optimalisasi dan penambahan SDM, baik melalui rekrutmen tenaga baru maupun penguatan aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kedua, memperkuat kerjasama dengan perangkat setempat seperti RT/RW dan kader masyarakat dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan layanan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada jumlah tenaga kerja. Ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mendukung efisiensi layanan, seperti penerapan sistem pendataan digital yang terpadu. Penentuan skala prioritas wilayah yang didasarkan pada data kerentanan sosial kependudukan perlu ditegaskan agar intervensi program dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan) menunjukkan bahwa Program Jebol Pawon Rembes di Kelurahan Wonokusumo sudah menunjukkan arah yang jelas dan relevan dalam mengurangi kerentanan sosial masyarakat. Program ini dibuat dengan tujuan yang spesifik, yaitu mengarah pada kelompok masyarakat rentan melalui strategi jemput bola yang selaras dengan situasi di lapangan.

Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada terbatasnya jangkauan pelayanan, belum adanya perencanaan yang menetapkan target kuantitatif dan batas waktu yang jelas, serta belum meratanya distribusi layanan ke seluruh wilayah. Selain itu, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang belum optimal serta ketergantungan pada peran aktif perangkat lokal juga turut memengaruhi konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Dengan demikian, Program Jebol Pawon Rembes telah memberikan kontribusi positif dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan, namun masih memperlukan penguatan SDM, pemerataan layanan, dan perencanaan yang lebih terukur agar pelaksanaannya lebih optimal.

REFERENSI

Adeoye, M. A., & Adong, C. (2023). The Power of Precision: Why Your Research Focus Should be SMART? Journal of Education Action Research, 7(4), 569–577. https://doi.org/10.23887/jear.v7i4.69757

Aqila, C., & Ismail, H. (2022). Efektivitas Kinerja Pelayanan Kelurahan Wonokusumo Terhadap Program Padat Karya Dispendukcapil Surabaya. 2(04).

Jelita, S. P., & Prastyawan, A. (2025). (Studi Pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya). 3.

Nudia Alfianti, & Wahyudi, K. E. (2024). Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Wonokusumo. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 713–730. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.164